

Anggota DPRD Setuju Kerja Sama dengan KPK

SEMARANG - Penolakan Ketua Sementara DPRD Jateng Rukma Setyabudi atas saran Gubernur Ganjar Pranowo soal kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menggambarkan pendapat umum kalangan Dewan. Bahkan beberapa anggota Dewan setuju dengan usul gubernur, meski dengan beberapa catatan.

Anggota Fraksi Partai Golkar Ferry Wirawan Cahyono mengatakan, saran gubernur sangat bagus. Sebab, seluruh lembaga negara memang harus memiliki semangat bersama dalam pemberantasan korupsi. Bahkan tanpa diimbuh siapa pun, seharusnya semangat pemberantasan korupsi menjadi fondasi kinerja legislatif. "Saran yang baik, dalam mencapai tujuan secara kelembagaan semestinya ada payung kerja sama," katanya.

Namun Ferry berharap, semangat pemberantasan korupsi tidak hanya di bibir. Baik eksekutif maupun legislatif harus mampu mengimplementasikan dalam setiap kegiatan. "Karena itu, pemerintahan bersih, transparan, dan akuntabel yang didambakan masyarakat Jateng bisa tercapai," kata politikus yang menepakan calon wakil ketua DPRD Jateng dari Golkar itu.

Anggota Fraksi PPP Masruhan Syamsarie setuju KPK dilibatkan dalam rapat-rapat perencanaan dan pembahasan anggaran. Sebab, selama ini hal itu sudah dilakukan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun dalam pelaksanaan APBD, yang bisa bekerja sama adalah eksekutif sebagai pelaksana anggaran.

"Kalam di tingkat perencanaan dan pembahasan oke. Seterusnya dalam pelaksanaan kan kami mengawasi. Jadi, sayu benanya model kerja sama itu bagaimana duh," katanya.

Yang perlu diperhatikan, menurut Masruhan, adalah pendidikan masyarakat dalam pencegahan korupsi. Ia menyebut banyaknya penyimpangan dana bantuan sosial oleh anggota Dewan dipengaruhi juga oleh ketidaktahan masyarakat tentang mekanisme penyaluran dana tersebut.

"Maka perlu bimbingan kepada masyarakat soal bansos. KPK kan selama ini kurang dalam pendidikan korupsi semacam itu," katanya. Anggota Fraksi Gerindra Sriyanto Saputro juga sepakat dengan saran Ganjar.

Hal yang Wajar

Seperti diketahui, Ganjar Pranowo menyarankan agar DPRD Jateng 2014-2019 meniru langkah Pemprov bekerja sama dengan KPK. Di antaranya dengan menandatangani pakta integritas serta berkomitmen tidak menerima dan memberi gratifikasi. Kerja sama itu penting agar anggota Dewan tidak mudah tergoda inring-inring materi.

Tapi saran itu ditolak Rukma Setyabudi. Menurut Rukma, Ganjar tidak perlu mengurus DPRD yang memiliki rumah tangga sendiri. Ganjar lebih baik fokus pada program-program kerjanya agar segera dapat terealisasi.

Ganjar menyatakan, saran itu bukan berarti dirinya ingin mengurus rumah tangga DPRD. Sebagai sesama lembaga penyelenggara pemerintahan daerah, ia mengajak Dewan bersama-sama mencegah korupsi. Soal diterima atau tidak usul itu, ia serahkan pada Dewan.

Ditemui di sela-sela Diklat Madya Anggota DPRD dari PDIP Tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, dan DPR usul Jateng, di Gumaya Tower Hotel, Semarang, Jumat (5/9), Rukma membantah menolak usul gubernur. Bahkan DPRD sudah bekerja sama dengan KPK pada periode terdahulu. "Kami sudah pernah kerja sama dengan KPK dalam pelatihan soal gratifikasi dan pelanggaran hukum. Dewan baru sudah menjadwalkan," jelasnya.

Di tempat yang sama, Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengaku belum mengetahui kabar ketidakharmonisan Ganjar dengan Fraksi PDIP. Kalaulah ada, ia menganggap hal itu dinamika politik yang wajar. "Tidak mungkin di politik tidak ada dinamika," katanya. (H68, J8-59)